

Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)

Evaluation of the Use of the Village Financial System (SISKEUDES) in Village Government Organizations (Case Study in Taraitak Satu Village, North Langowan District, Minahasa Regency).

Eunike Debora Kereh¹, Jenny Morasa², Lidia Mawikere³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu,
Manado, 95115, Indonesia

E-mail : eunikekereh00@gmail.com

Abstrak: Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa yang menjadi objek penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Prosedur penggunaan sistem keuangan desa di desa taraitak satu dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan (2) Kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa sudah dapat di katakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi (3) Manfaat dari apikasi sistem keuangan desa menjadikan pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan. (4) Kendala terhadap penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu sering terjadimasalah *error* saat proses penginputan (5) Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Pemerintah desa, Taraitak satu.

Abstract: *Taraitak Satu Village, North Langowan District, Minahasa Regency which is the object of this study aims to determine the results of the Evaluation of the Use of the Village Financial System (SISKEUDES) in village government organizations. This study uses a qualitative research approach. The data used is primary data in the form of interviews and documentation. The informants used were the Village Head, Village Secretary and Head of Village Government Affairs. The results showed that menunjukkan (1) The procedure for using the village financial system in Taraitak Satu Village is carried out in accordance with the village financial management procedures, namely planning, implementation, administration and reporting (2) The readiness of the village government in implementing the application of the village financial system can be said to be ready because in terms of human resources that have been fulfilled (3) The benefits of the application of the village financial system make the village government work more effectively and efficiently in producing financial reports (4) Obstacles to the application of the village financial system are frequent error problems during the input process (5) There are still some reports that have not been inputted into the system and are still using manual reporting.*

Keywords: *Village Financial System, Village government, Taraitak Satu.*

PENDAHULUAN

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaiman kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini. (UU no. 6 Tahun 2014). Pada saat otonomi daerah dimulai harapan yang muncul adalah pemerintah desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan di desa masing-masing, karena setiap desa diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan.

Pemerintahan saat ini memprioritaskan pembangunan desa karena undang- undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pmda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Kantor desa taraitak 1 seringkali salah dalam mengelola keuangan desa sehingga pemerintah desa selalu mencari solusi mengatasi kesalahan pengelolaan keuangan. Adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa taraitak satu sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini sangat baik digunakan oleh aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa hasilnya lebih teratur dengan baik tetapi masih adanya kesalahan di sengaja dan tidak di sengaja dari beberapa pihak aparat desa dikarenakan sering kali terjadi permasalahan dalam jaringan komputer dan pemadaman listrik.

1.1 Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut pandang kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak- pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan (Pujiyanti, 2015:19). Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang informatif dan diukur dalam bentuk mata uang, atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian keuangan perusahaan dan interpretasi hasilnya (Tanor, 2015).

2.1 Pemerintah Desa

Menurut Supriadi (2015), pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Atmadja (2016), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

3.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Sebelum mengetahui definisi dari pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya kekayaan desa. Menurut Atmaja (2016), keuangan desa adalah dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Herlianto (2017), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

4.1 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip pengelolaan keuangan desa Menurut Taufik (2015) meliputi :

- a. Prinsip Transpransi, yaitu keterbukaan pemerintah desa terhadap berbagai aspek layanan dan informasi terkait keuangan desa. Dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang di tutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.
- b. Prinsip Akuntabilitas, yaitu pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
- c. Partisipasi, dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa masyarakat harus diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait program/kegiatan pembangunan desa. Mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

5.1 Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudal diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES (Admaja, 2016).

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif menekankan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Kuncoro:2013:53). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Kantor Desa Taraitak Satu Kabupaten Minahasa mengenai permasalahan penelitian.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu Data Kualitatif. Menurut Kuncoro (2016:56), data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data profil desa, rekaman suara pembicaraan dan dokumentasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Taraitak Satu mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:61). Sumber primer ini berupa observasi dan informasi secara langsung tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Taraitak Satu. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber dari objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Kepala, Sekretaris, dan Bendahara Desa serta perangkat desa lainnya yang berkaitan langsung dengan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data ini yang di peroleh dari catatan- catatan yang dimiliki perusahaan. Dalam teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran prosedur penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.
3. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau saksama. Teknik pengumpulan data ini yang di peroleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.

2.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang menguraikan atau menggambarkan bagaimana penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintah desa di desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Data-data yang di pakai untuk di analisa yaitu hasil wawancara, domentasi, observasi

Adapun langkah – langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah :

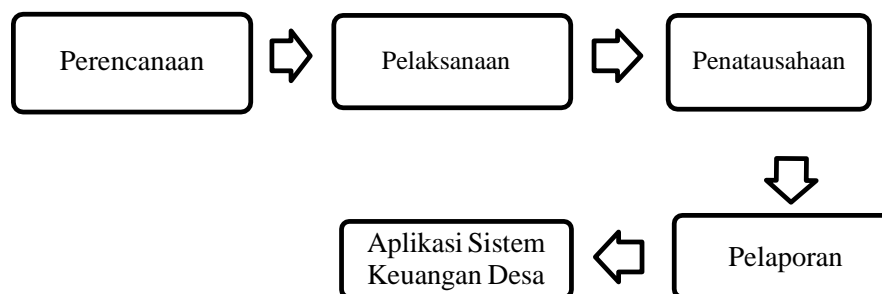
1. Melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan dalam menyusun sistem keuangan desa pada desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.
2. Mengumpulkan data dari kantor desa berupa laporan keuangan yang meliputi: sejarah desa, visi dan misi desa, struktur organisasi serta data laporan keuangan lainnya.
3. Dari data yang di peroleh di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengkaji, memaparkan dan menjelaskan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang penyusunan dan penyajian sistem keuangan desa.
4. Selanjutnya menganalisis hasil wawancara dan menarik kesimpulan atas kesesuaian penyajian laporan keuangan serta evaluasi penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (studi kasus di desa taraitak satu kecamatan langowan utara kabupaten minahasa
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang di anggap perlu sebagai pemecahan dalam permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Dan Pembangunan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa, aplikasi ini juga dibuat agar pemerintah pusat lebih mudah mengawasi proses pengelolaan keuangan desa. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan desa di Desa Taraitak Satu sudah dilakukan secara terstruktur, menurut Kepala Desa Taraitak satu Bapak Nixon Aruperes, dengan adanya aplikasi ini semua harus di laksanakan sesuai prosedur, semua laporan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan.



Gambar 1. Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Sumber : Data Olahan 2022.

1. Proses Perencanaan, pemerintah desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Rancangan Anggaran Biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi dasar untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Proses Pelaksanaan, adalah tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
3. Proses Penatausahaan, tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi- transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes.
4. Proses Pelaporan, tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah di lakukan selama periode tertentu.



Gambar 2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Sumber : Hasil Dokumentasi Desa Taraitak Satu

Adapun proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini sangat mudah dan sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. *Log in* ke sistem dengan menggunakan *user ID* dan *Password* yang dimiliki Desa Taraitak Satu.
2. Setelah berhasil masuk ke sistem, untuk memasukkan data pilih Data Entri, kemudian pilih menu yang tertera. Dalam Data Entri terdapat 4 menu yaitu Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan.

3.1.2 Kendala Terhadap Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Taraitak Satu

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu. Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP agar desa-desa diseluruh Indonesia mampu menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan mengurangi terjadinya korupsi yang kerap dilakukan oleh aparat desa karena kurangnya kontrol dari pusat, adanya penerapan Evaluasi Keuangan Desa tersebut tentunya memberikan kelebihan maupun kelemahan bagi penggunaannya. Menurut Sekretaris Desa Taraitak Satu Bapak Ezra Kiling, kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini memudahkan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan, aplikasi ini juga bisa digunakan secara *online* maupun *offline*, dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Taraitak Satu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Taraitak Satu sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur penggunaan SISKEUDES pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Dimulai dari tahap perencanaan dimana Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Anggaran Biaya dibuat untuk memaksimalkan biaya-biaya yang akan dilakukan untuk kegiatan pembangunan desa, RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

Hasil penelitian Di Desa Taraitak Satu menunjukkan bahwa setelah menyusun RAB yang akan dituangkan ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa pemerintah desa akan menyusun APBDesa dalam jangka waktu 1 tahun, setelah selesai akan diperiksa dan di input ke sistem dalam Menu Penganggaran. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan sudah sejalan dengan teori Pengelolaan Keuangan Desa : Pelaksanaan dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan sesuai APBDesa.

. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa Menu Penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Hasil penelitian ini pun sudah sejalan dengan teori Pengelolaan Keuangan Desa : Penatausahaan dimana semua pencatatan/pembukuan atas segala transaksi yang terjadi dilakukan dalam tahap penatausahaan.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan, laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Dampak positif dari adanya Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa lebih meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa, hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kerja Pemerintah Desa. Kesiapan dari Pemerintah Desa pun dapat dikatakan siap, karena terlihat dari segi SDM yang terpenuhi. Penggunaan Sistem Keuangan Desa tentunya tidak luput dari beberapa kendala seperti yang di katakan Kepala Desa bahwa masih ada beberapa laporan yang belum input ke sistem, hal ini mungkin terjadi karena SISKEUDES sering mengalami *error* , ada baiknya para pegawai berusaha untuk melakukan koordinasi antar pegawai dan pendamping desa untuk dapat memaksimalkan pekerjaan sehingga mampu mengatasi masalah yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Taraitak Satu dilakukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan.
2. Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dapat dikatakan siap karena dari segi SDM yang sudah terpenuhi.

3. Manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan Laporan Keuangan.
4. Kendala terhadap penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu sering terjadi masalah *error* saat proses penginputan.
5. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Saran

Berdasarkan analisa yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Diharapkan Pemerintah Desa Taraitak Satu dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat mendukung proses Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Memaksimalkan laporan-laporan yang belum terinput ke sistem agar tercipta kualitas Laporan Keuangan yang baik.
4. Lebih bersosialisasi dengan pemerintah setempat atau pendamping desa agar lebih meminimalisir terjadinya *error* pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar)*. E-jurnal katalogis. ISSN 2302-2019. Volume 3. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herlianto. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kuncoro . 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro. 2016. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pujiyanti. 2015. *Akuntansi Dasar*. Penerbit: Lembar Pustaka Indonesia.
- Sugiyono. 2015. . *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, Wahyuni, Kurniawan. 2017. Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntan*. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197>.
- Supriadi. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat
- Tanor. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Artha Graha International Tbk*. *Jurnal EMBA*, 608-743.
- Taufik. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

